

BAB III

KEDEKATAN TRUMP DENGAN LOBI-LOBI YAHUDI DAN ISRAEL

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Palestina dengan Israel telah menjadi bagian penting dari agenda politik luar negeri Amerika Serikat. Hal ini meliputi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, salah satunya adalah dengan mempertahankan eksistensi negara Israel. Namun dalam usaha Amerika Serikat mempertahankan eksistensi Israel, ada hal penting yang harus dipertimbangkan Amerika Serikat yakni menyelesaikan konflik dengan negara bersengketa yakni Palestina. Pasca kemenangan Amerika Serikat dan Israel pada perang 1967, Amerika Serikat memiliki gagasan untuk membuat perjanjian damai dengan negara di kawasan Timur Tengah yang diawali dengan perjanjian Camp David. Selanjutnya memasuki era baru, Amerika Serikat mulai menggagas perdamaian dengan Palestina yang dimulai pada tahun 1993 yang menghasilkan perjanjian Oslo. Namun berbagai upaya perdamaian yang ditempuh Amerika Serikat sangat sulit untuk diwujudkan, mengingat sikap bias Amerika Serikat yang lebih mengutamakan kepentingan Israel daripada Palestina.

Selain itu dengan adanya Konstitusi tentang Yerusalem yang dibuat pada tahun 1995 tentang pengakuan wilayah Yerusalem sebagai bagian dari Israel, maka Presiden terpilih juga harus mempertimbangkan mandat yang tertera dalam konstitusi tersebut. Sehingga memberikan dilema bagi Amerika Serikat yang berperan sebagai mediator dan terlibat dalam berbagai agenda pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel. Selain itu kepercayaan Palestina terhadap netralitas sikap Amerika Serikat semakin tergerus dengan semakin terbukanya dukungan Amerika Serikat terhadap kepentingan Israel, sehingga mempersulit terjadinya perdamaian antara Palestina-Israel. Namun demikian, sejak undang-undang tersebut disahkan pada era Presiden Bill Clinton,

undang-undang tersebut faktanya ditangguhkan oleh Presiden Bill Clinton. Selain itu pada periode selanjutnya undang-undang tersebut juga di tangguhkan oleh Presiden George Walker Bush dan Presiden Barrack Obama dengan dalih keamanan nasional Amerika Serikat.

Pada tahun 2017, terjadi pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, tentang keputusannya mengakui wilayah Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Keputusan tersebut tentu sangat bertentangan dengan kesepakatan perdamaian yang dikehendaki selama ini. Selain itu, keputusan yang juga tertera dalam undangundang tersebut untuk pertama kali dilaksanakan oleh Presiden Amerika Serikat terpilih, setelah sebelumnya ditangguhkan oleh Presiden pendahulunya. Meskipun menjadi polemik dan pertentangan oleh beberapa negara, namun hal tersebut tidak mempengaruhi upaya Donald Trump untuk merealisasikan keputusannya, yakni dengan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan tersebut didasari berbagai pertimbangan yang sesuai dengan pemikiran rasional Donald Trump sebagai pembuat kebijakan.

Selanjutnya pada 10 September 2018 Trump mengumumkan penutupan kantor PLO yang ada di Amerika. Organisasi PLO yang didirikan sebagai entitas politik yang akan mewakili kepentingan Palestina yang berfungsi secara independen dari pemerintah Arab, awalnya sebuah organisasi yang bergerak dengan perjuangan fisik.¹⁰³ Namun pada masa kepemimpinan Yasser Arafat (1969-2004), PLO telah mengalami perubahan perjuangan ke diplomasi. Tepatnya pada tahun 1979 dalam sidang PNC; Arafat telah diberi mandat bebas untuk berunding secara terang-terangan dengan Israel. Dengan begitu, muncul beberapa perundingan antara lain Konferensi Madrid 1991 dan Perjanjian Oslo 1993. Dan kredibilitas Arafat di kalangan rakyat Palestina tergantung kepada kemampuannya (Kumoro, 2009).

A. Profil Trump Presiden Amerika

Trump terlahir sebagai anak keempat dari lima bersaudara, orang tuanya adalah Fred Trump dan Mary Anne MacLeod Trump.³⁷ Ibu Trump, Mary adalah imigran dari Skotlandia, pada tahun 1929 tepatnya umur 17. Lalu menikah pada tahun 1936 dengan ayah Trump. Pada tahun 1950 kehidupan ekonomi keluarga Trump meningkat drastis dan menjadikan ibunya sebagai sosialita filantropis di kalangannya. Trump lahir pada 14 Juni 1946 di Kota New York, Amerika. Trump lahir di masa kejayaan ayahnya yang bekerja sebagai seorang kontraktor yang telah membangun beberapa apartemen di Wilayah Queens, Brooklyn, dan Staten Island untuk masyarakat dengan kelas ekonomi tingkat atas (Admojo, 2013).

Berbagai karakteristik menyimpang Trump tersebut, tidak lain dikarenakan Trump secara umum mengalami kekacauan, yaitu RAD (*Reactive Attachment Disorder*) (Academy, 2017). RAD adalah sebuah kondisi psikologis yang disebabkan oleh absensi kehadiran orang tua, terutama ibu. Dalam hal ini, kondisi psikologis anak akan mencari kehadiran, perhatian, dan keamanan yang tidak didapatkan ketika seorang individu kecil hingga dewasa. Hal ini menyebabkan anak menjadi seseorang yang narsistik, tidak dapat membedakan baik dan buruk, benar salah, atau kawan dan lawan, hingga tidak dapat menerima saran dari orang lain, dan membangkang. Serta membuat seorang anak yang merasa terabaikan dan ditinggalkan menjadi seorang yang suka merendahkan atau suka membully orang lain. RAD menjadi sangat krusial, karena anak akan memosisikan diri sebagai *anti-dependent* atau tidak bisa mengakui kebutuhannya akan kehadiran orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ia tidak ketahui. Hal tersebut adalah hal alamiah yang dilakukan manusia dan untuk melakukan perlindungan dari lingkungan sosial, seseorang akan menunjukkan sikap yang ambivalen dari apa yang sebenarnya ia rasakan (Admojo, 2013).

Ayahnya lalu bergabung menjadi dewan sekolah, dengan harapan dapat mengontrol masalah. Namun, hal tersebut gagal, saat ia berusia 10-12 tahun, Trump justru menyelip ke New

York dan pergi ke pertunjukan dengan temannya, lalu melihat *West Side Story*. Ia kemudian memulai hobi untuk membeli dan mengoleksi belati yang banyak. Namun, hal tersebut membuat sang ayah marah dan membuat sebuah keputusan untuk memasukkannya ke sekolah militer. Menurut sang ayah, Trump merupakan anak yang kasar, sedangkan dalam pandangan teman, ia dikenal berkeinginan kuat. Trump dan sang ayah memiliki kebiasaan untuk berkunjung ke tempat pembangunan selama liburan dan mempelajari cara membangun bangunan yang baik, bahkan untuk tidak membuang satu paku-pun. Ayah Trump membentuk anaknya dalam jiwa yang sangat kompetitif (Robinson, 2017).

Trump dibesarkan di dalam rumah mewah dengan 23 kamar dan bersekolah di sekolah swasta. Lahir dan dibesarkan dengan kemewahan membuat Trump menjadi manja dan berkuasa. Walaupun demikian Trump dikenal sebagai seorang penganut kristen yang religius. Trump belajar dari kematian kakak pertamanya di usia yang relatif muda, karena kecanduan alkohol yaitu Fred Trump. Sehingga dia tidak pernah minum alkohol dan merokok. Dalam bukunya *The Art of Deal*, ia menyebutkan telah menjadi pribadi yang kompetitif dan vokal dalam memberikan pendapat. Salah satu contohnya adalah ketika Trump memukul guru seni musiknya saat berada di kelas 2 SD dan membuatnya hampir dikeluarkan. Ia menuturkan hal ini dan dibenarkan oleh teman sekolahnya, ia ingin menunjukkan persona yang tegas sejak kecil. Hal ini memberikan pengaruh bagi pembentukan karakter Trump (Smith, 2018).

Pemilihan presiden pada tahun 2016 lalu merupakan kontestasi politik yang mengejutkan, hal ini karena bergabungnya Donald Trump sebagai tokoh yang cukup kontroversial dari partai republik yang secara langsung melawan Hillary Clinton dari partai Demokrat. Pada pemilihan presiden tahun 2016 tersebut menawarkan visi berbeda dan sering bersaing mengenai berbagai isu,

seperti ekonomi, militer, kebijakan luar negeri, dan isu-isu domestik lainnya. Polarisasi antara partai Republik dan Demokrat juga terjadi pada saat pemilu (MEE, 2016).

Salah satu yang menarik dari pemilihan umum 2016 yaitu adalah kedua kandidat tersebut seringkali memiliki visi yang bertolak belakang, namun kedua kandidat tersebut kompak untuk memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel, sementara seringkali mengesampingkan hak Palestina. Hal ini terlihat jelas dalam visi mereka di ranah kebijakan luar negeri, khususnya yang menyangkut konflik Palestina-Israel. Pihak dari partai Demokrat maupun Republik sepakat dengan visi yang sama, yaitu, Israel akan diberi dukungan finansial, militer dan diplomatik tanpa syarat, dan pihak Palestina sering di kesampingkan atau tidak pernah ditangani secara substansial, dan tetap mempertimbangkan kepentingan keamanan Israel dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Selain itu sudah menjadi rahasia umum bahwa siapapun kandidat calon presiden yang akan maju, selalu ada campur tangan pelobi AIPAC dan harus menyertakan kepentingan Israel meskipun disisi lain Amerika Serikat juga menjadi mediator dari konflik Palestina dengan Israel.

Namun yang menarik adalah pernyataan yang dilontarkan Donald Trump terkait pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, pada saat kampanye pemilihan Presiden tahun 2016 lalu di hadapan Komisi Urusan Luar Negeri Amerika Serikat-Israel. berikut pernyataannya (Detik, 2017):

“Saat saya menjadi Presiden, hari-hari memperlakukan Israel seperti warga kelas dua akan berakhir pada hari pertama. Kita akan memindahkan Kedutaan Amerika ke ibu kota abadi warga Yahudi, Yerusalem,”

Visi Donald Trump tersebut merupakan terobosan baru yang belum pernah terealisasi oleh presiden Amerika Serikat sebelumnya. Pernyataan tersebut kemudian masuk kedalam janji politik

Donald Trump. Hal tersebut tentu menarik simpatisan Yahudi pro-Israel, salah satunya yang berpengaruh pada masa kampanye Donald Trump yakni Sheldon Adelson, yang memberikan dana dukungan pada partai Republik sebesar 82 juta US dollar untuk pemilu 2016, demi mendukung pandangannya terhadap Israel. Sumbangan dana tersebut tentu membantu pihak Donald Trump, hal ini dikarenakan pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu, Hillary Clinton lebih mendominasi dana kampanye, hal ini meliputi dana kas tunai Hillary sebesar USD62 juta atau setara dengan Rp809,57 miliar dan sumbangan 1 miliar US dollar atau setara dengan Rp13,05 triliun, yang diperoleh dari para donatur pengusaha besar pro-Hillary yang menginvestasikan uangnya melalui Super-PAC (*Political Action Committee*) yaitu sebuah organisasi yang dibentuk untuk mengumpulkan sumbangan kampanye, baik terhadap kandidat calon Presiden maupun calon kepala daerah di Amerika Serikat (SindoNews, 2017).

Sedangkan pada saat kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu, dana kas tunai Donald Trump hanya seperempat dari tim Hillary, yaitu USD16 juta atau berkisar Rp208,92 miliar, yang berasal dari dana pribadinya, dan sumbangan yang diperoleh dari Super-PAC pro-Trump yang hanya berkisar USD59,1 juta alias Rp770,94 miliar. Maka dana sumbangan tunggal yang diberikan oleh Sheldon Adelson membantu menyokong kebutuhan kampanye pihak Donald Trump, sebesar lima puluh persen dari jumlah dana kampanye. Dana kampanye tersebut dihabiskan sebanyak USD50,1 juta atau Rp654,19 miliar. Dari jumlah tersebut, lebih dari USD30 juta (Rp391,73 miliar) untuk belanja media dan USD1,7 juta untuk membayar tim suksesnya (SindoNews, 2017).

Antusiasme yang ditunjukkan Sheldon terhadap janji politik Donald Trump tersebut didukung dengan komitmen Donald Trump yang akan mendahulukan kepentingan Amerika Serikat. Bahkan Sheldon Adelson memberikan pernyataan bahwa ia memiliki keyakinan bahwa

Donald Trump akan menjadi presiden yang luar biasa manakala menyangkut kepentingan Israel. Selain itu Sheldon juga mengupayakan kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton melalui kantor berita Associated Press, yang mengirim email ke lebih dari 50 anggota Koalisi Yahudi Republik, dimana ia meminta mereka untuk mendukung Trump sebagai calon Presiden dari Partai Republik (JPOST, 2016).

Pengaruh tersebut juga mempengaruhi kuatnya suara pemenangan Donald Trump di kalangan Electoral College, mengingat dalam konstitusi Amerika Serikat diatur bahwa proses pemilu tidak secara langsung dipilih oleh rakyat, melainkan melalui perwakilan elector pada setiap negara bagian. Meskipun pada dasarnya populer vote Hillary Clinton lebih unggul di masyarakat. Komitmen yang dibuat Donald Trump untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem, telah berdampak terhadap proses pemenangannya untuk meraih kursi Presiden Amerika Serikat. Adanya janji kampanye untuk merealisasikan pemindahan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem seperti yang tertuang dalam Jerusalem Embassy Act 1995, memperkuat basis politiknya, dengan adanya dukungan pihak Kristen Evangelis dan Yahudi pro Israel. Pertimbangan yang dihadapi Presiden Donald Trump jika tidak memperlihatkan komitmennya menyangkut kepentingan luar negeri Amerika Serikat terkait Yerusalem adalah proses pemenangannya akan terhambat. Hal ini karena dari segi dana kampanye dan “*vote popularity*” pihak Hillary Clinton jauh lebih unggul dari Donald Trump. Dana kampanye yang terbatas dari dana pribadi dan dana Super-PAC pun tidak akan memenuhi kebutuhan kampanye Donald Trump untuk melawan survei Hillary Clinton yang mempengaruhi tanggapan masyarakat.

Terpilihnya Presiden Donald Trump menggantikan Barrack Obama menjadi titik balik dari kebijakan Amerika Serikat tentang perdamaian Palestina dengan Israel. Presiden yang diusung dari Partai republik tersebut memiliki kebijakan yang ekstrim dan berbanding terbalik dengan yang

telah dilakukan Presiden sebelumnya, hal ini didasari kedekatannya dengan kaum Kristen Evangelis dan juga sikap politiknya yang pro Israel. Hal ini dibuktikan dengan janji kampanye yang diutarakan Donald Trump pada para pelobi Israel, tentang usaha untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, dan juga memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan terkait rencana pemindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem diwujudkan Presiden Donald Trump secara terbuka pada bulan Desember 2017. Hal ini mengejutkan banyak pihak, terlebih lagi pihak Palestina.

Banyak pihak yang menentang dengan keputusan tersebut, hingga dikeluarkannya Resolusi DK PBB sebagai upaya penghentian Keputusan tersebut, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Langkah yang diambil Donald Trump merupakan perwujudan dari konstitusi yang sudah ada sejak 1995, yakni pengesahan undang-undang agar Amerika Serikat mesti memulai pendanaan dan pemindahan kedutaan besar negara dari Tel Aviv ke Yerusalem, paling lambat dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1999. Realisasi UU ini juga berlaku sebagai tanda penghormatan untuk kebijakan Israel yang memutuskan Yerusalem sebagai ibukota mereka. Meskipun demikian, Undang-undang tersebut belum terealisasi sepanjang masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton, George W. Bush, hingga Barack Obama. Mereka semua memilih menangguhkan undang-undang tersebut dengan pertimbangan utamanya adalah dampak yang akan dihasilkan bersifat negatif baik untuk keamanan nasional Amerika Serikat maupun kestabilan Timur Tengah. Demi menghindari konflik baru, tiap enam bulan mereka menggunakan hak penolakannya dengan menandatangani surat khusus. Tindak lanjut dari keputusan yang diambil oleh Presiden Donald Trump adalah mengupayakan agar pihak Palestina menyetujui untuk rencana perdamaian yang disebut “kesepakatan abad ini” yang masih dalam tahap perumusan. Hal ini berkaitan dengan penggabungan misi diplomatik Palestina dengan Kedutaan besar Israel yang

dilakukan oleh Amerika Serikat pasca penutupan kantor diplomatik PLO di Amerika Serikat (AA, 2018).

Selain itu pihak Amerika Serikat juga menekan dengan berbagai cara salah satunya dengan memangkas biaya bantuan untuk Palestina. Hal ini dilakukan agar Palestina bersedia bergabung dalam perundingan perdamaian yang masih dalam tahap perencanaan dan akan dikeluarkan pihak Presiden Donald Trump pada 2019 tersebut. Namun berbagai upaya yang dibuat oleh Presiden Donald Trump sampai saat ini belum memberikan hasil untuk mewujudkan perdamaian Palestina dengan Israel, dan semakin membuat konflik antara kedua negara tersebut berlanjut.

B. Organisasi Yahudi di Amerika

Ada tiga kelompok lobi pro-Israel yang memiliki pengaruh besar dalam melobi pembuat kebijakan luar negeri di AS. Tiga di antaranya adalah AIPAC, ADL dan ZOA. Ketiganya merupakan lembaga lobi terbesar yang mampu mempunyai akses untuk melobi Kongres dan Senat serta memiliki pengaruh di media massa yang bertujuan untuk melanggengkan kepentingan Israel melalui kebijakan luar negeri AS (Findley, 1990).

1. AIPAC (*Amerikan Israel Public Affairs Committee*)

Amerika Serikat dipilih sebagai negara yang menjadi tempat diaspora Yahudi mengingat power dan pengaruh yang dimiliki oleh negara tersebut sangatlah kuat. Organisasi ini telah meraih kekuasaan untuk mempengaruhi pemilihan kandidat presiden, menghalangi praktis penjualan senjata ke negara Arab dan bertindak sebagai katalisator bagi hubungan militer Pentagon dan Israeli Defensive Force (IDF). AIPAC adalah lobi etnis paling kuat dalam sejarah Amerika Serikat. Pengaruhnya dapat dirasakan di Gedung Putih, Pentagon dan Capitol Hill. Peran AIPAC dalam

melobi para pembuat kebijakan baik Kongres, Senat ataupun presiden sebagai eksekutif sangatlah signifikan. Sebagai satu-satunya kelompok lobi pro-Israel yang mampu bersaing di antara lobi-lobi lainnya, AIPAC hanya menempati urutan kedua dalam kemampuan melobi setelah Yayasan Pensiunan AS (Mearsheimer, 2008).

Lobi yang dilakukan oleh AIPAC mampu menjembatani antara kepentingan nasional Amerika Serikat dengan kepentingan kelompok lobi. Penerapan kebijakan luar negeri yang pro-Israel maka Amerika Serikat telah bertindak sesuai dengan “kepentingan nasional” mereka. Pada dasarnya visi dan misi organisasi lobi pro-Israel bertujuan untuk mengedukasi para anggota Kongres, Senat, cendekiawan ataupun mahasiswa dan profesional media bahwa hubungan bilateral antara AS-Israel adalah sesuatu yang sangat krusial (Mearsheimer, 2008).

Sebagai contoh, AIPAC memiliki program untuk menjadikan Israel sebagai aset strategi dan rasional dari kebijakan luar negeri AS dan untuk mencapai kepentingan nasional kedua negara dalam memerangi terorisme dan mencegah pengembangan nuklir Iran. Kesamaan visi misi tersebut dijadikan sebagai suatu alat legitimasi oleh AIPAC untuk meyakinkan elite-elite politik AS bahwa Israel adalah mitra strategis. Kenyataannya, lobi tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan Israel bukan AS. Kelompok lobi Israel mempunyai peran yang sangat penting pada saat pemilihan legislatif dan eksekutif di AS (Findley, 1990).

Para pejabat AS baik yang terpilih di Kongres, Senat dan bahkan presiden, pasti melakukan kampanye di tengah-tengah komunitas Yahudi. Tentunya pada saat masa-masa kampanye tersebut, kelompok lobi memberikan dana bantuan dengan imbalan ketika mereka terpilih harus memfokuskan Israel sebagai mitra strategis. Meskipun AS memiliki tradisi demokrasi yang kental, sesungguhnya hanya sedikit penduduk AS yang memberikan suaranya, bahkan hampir setengah

dari pemilih tidak memberikan suara. Sebaliknya, enam juta Yahudi yang hanya 3% dari seluruh penduduk bisa secara maksimal memberikan 90% suara mereka (Piper, 2008).

Kekuatan dana finansial kelompok lobi Israel tersebut sangat dibutuhkan kandidat legislatif dan eksekutif dalam proses pemilihan umum tersebut. Kekuatan lainnya yang dimiliki oleh kelompok lobi adalah afiliasi dengan media massa berpengaruh di AS. Tujuannya untuk menyensor, membentuk opini publik sekaligus menggunakannya sebagai alat penekan bagi elite politik AS yang kritis terhadap Israel (Findley, 1990).

Hal ini pernah terjadi pada tahun 1984 saat Senator Charles Percy menyetujui penjualan sistem pertahanan udara pada Arab Saudi serta sikapnya yang kritis terhadap Israel. Media massa memainkan peran yang penting di AS mengingat pamor seseorang dapat naik ataupun turun melalui surat kabar ataupun media elektronik. Apabila Kongres, Senat ataupun presiden bertindak kontra dengan pemerintah Israel, maka posisi mereka akan goyah dan tidak akan pernah bisa untuk menduduki kembali jabatan tersebut.

2. ADL (*Anti-Defamation League*)

ADL (*Anti-Defamation League*) yaitu organisasi Yahudi atau Liga Anti-Fitnah (LAF), yang awalnya dikenal sebagai Liga Anti-Fitnah B'nai B'rith, adalah sebuah organisasi non-pemerintahan Yahudi internasional yang berbasis di Amerika Serikat. Mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai "agensi hubungan manusia/hak asasi sipil utama di negara tersebut", LAF menyatakan bahwa organisasi tersebut "melawan anti-Semitisme dan seluruh bentuk kefanatikan, mempertahankan pemikiran demokratik dan melindungi hak asasi sipil untuk seluruh masyarakat," melalui "informasi, pendidikan, legislasi, dan advokasi (www.voaindonesia.com, 2018).

Didirikan pada Oktober 1913 oleh Ordo Independen B'nai B'rith, sebuah organisasi layanan Yahudi di Amerika Serikat, pernyataan misi aslinya adalah "untuk menghentikan pemfitnahan

orang Israel, dengan membandingkan alasan dan hati nurani dan, jika perlu, melalui hukum banding. Keperluan utamanya adalah untuk melindungi keadilan dan pernyataan adil kepada seluruh warna negara dan untuk selamanya mengakhiri ketidakpastian dan diskriminasi yang tidak adil melawan sekte atau badan warga negara apapun." LAF memiliki 29 kantor di Amerika Serikat dan tiga kantor di negara lainnya, dengan markas besarnya terletak di New York City. Abraham Foxman menjadi direktur nasional-nya sejak 1987. Pada November 2014, diumumkan bahwa Jonathan Greenblatt akan menggantikan Foxman sebagai direktur nasional pada Juli 2015. Ketua nasional-nya adalah Barry Curtiss-Lusher.

Liga Anti-Fitnah telah menuai kritikan dan kontroversi terkait prioritasnya. Noam Chomsky menuduh organisasi tersebut "kehilangan fokus mereka secara keseluruhan terhadap masalah hak-hak sipil dalam rangka menjadi advokat untuk kebijakan Israel". Jurnalis Mark Arax mengkritik kegagalan organisasi tersebut untuk mengakui Genosida Armenia.

3. ZOA (*Zionist Organization of America*)

ZOA adalah organisasi Zionis pertama di AS yang berdiri pada tahun 1897 dengan anggota yang mencapai lebih dari 25 ribu. Mereka memberikan dukungan penuh saat Deklarasi Balfour lahir pada tahun 1917. Deklarasi Balfour adalah dukungan resmi Inggris untuk pendirian tanah air bagi orang-orang Yahudi, dengan demikian bisa dianggap sebagai bibit realisasi proyek Zionisme. Saat negara Israel dideklarasikan pada tahun 1948, ZOA memobilisasi dukungan baik dari kalangan pemerintah, kongres, maupun masyarakat AS untuk memberikannya. Mereka mengkritik penunjukan George W. Mitchell sebagai utusan AS untuk Timur Tengah pada tahun 2009 karena Mitchell dinilai kurang pro-Israel. Mereka juga mendesak Kongres AS untuk mengetatkan sanksi untuk Iran sekaligus menuntut transparansi penuh untuk dana bantuan kemanusiaan AS untuk warga Palestina.

Dengan demikian, pada hari di mana Trump mengejutkan dunia dengan klaim sepihaknya terkait status Yerusalem, ZOA merilis dukungan yang di laman resminya dengan judul “ZOA Memuji Presiden Trump karena Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan Rencana Memindahkan Kedutaan Besar ke Sana”. Isinya berisi argumen teologis hingga politis untuk menguatkan keputusan Trump yang sesungguhnya melabrak aturan internasional dan dikecam hampir seluruh politisi dunia (tirto.id, 2018).

C. Kedekatan Trump dengan Lobi Yahudi

PLO (*Palestine Liberation Organization*) adalah organisasi gabungan dari beberapa faksi perjuangan rakyat Palestina. Organisasi ini didirikan tahun 1964 melalui Muktamar Umum Rakyat Palestina atau PNC pada 28 Mei –2 Juni 1964 di Kota Al-Quds (Yerusalem) dengan dihadiri oleh 422 representasi Palestina. Pada muktamar itu, Ahmad al-Syaqiri terpilih sebagai Ketua PLO yang pertama 1964 s.d 1967, digantikan oleh Yahya Hamuda sampai tahun 1969, kemudian padatahun 1969 Ketua PLO dijabat oleh Yasser Arafat sampai ia meninggal pada tahun 2004 (Kumoro, 2009).

Perubahan kepemimpinan Presiden Trump menutup Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang telah aktif di Washington selama lebih dari dua decade, dilaporkan ditutup karena Otoritas Palestina menolak desakan Trump untuk masuk ke perundingan perdamaian yang dipimpin Amerika. Palestina mengklaim bahwa pemerintahan Trump bias terhadap mereka dan sepenuhnya mengadopsi posisi Israel, dan mengatakan mereka hanya akan bernegosiasi di bawah mediasi forum internasional yang lebih luas. Laporan itu juga menyatakan bahwa Bolton akan mengancam untuk mengambil tindakan terhadap Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag jika bergerak maju dengan penyelidikan yang difokuskan pada tindakan Israel di Gaza. Bolton

juga akan mengancam untuk melarang hakim ICC memasuki Amerika Serikat dan memberi sanksi dana mereka di lembaga keuangan Amerika, jika pengadilan bertindak terhadap Amerika Serikat (Nasional, 2018).

Tahun 2017, pemerintahan Trump mengancam akan menutup delegasi PLO, menyatakan bahwa undang-undang Amerika mengharuskan perundingan Israel-Palestina yang bermakna untuk memungkinkan delegasi melanjutkan operasinya. Namun, saat itu, negosiasi antara AS dan Otoritas Palestina masih berlangsung, sehingga pemerintah berhasil menunda keputusan tentang masalah tersebut.

Administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penutupan misi diplomatik Palestina di Washington pada hari Senin 10 September 2018 Mereka juga mengancam sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (*ICC/International Criminal Court*) apabila melakukan penyelidikan terhadap AS, Israel, atau sekutu lainnya. Langkah tersebut kemungkinan akan mengeraskan perlawanan Palestina terhadap peran AS sebagai pialang perdamaian (politik, 2018).

Pemerintah AS mengutip penolakan para pemimpin Palestina untuk memasuki pembicaraan damai dengan Israel sebagai alasan untuk menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (*PLO/Palestinian Liberation Organization*), meskipun AS belum mempresentasikan rencananya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Palestina menuduh pemerintah Amerika membongkar puluhan tahun keterlibatan AS dengan mereka.

Pada pendirian negara Israel sejak tahun 1948, kota Yerusalem sudah terbagi menjadi dua, antara kawasan barat yang dikuasai oleh Israel dan Kawasan Timur yang berada di bawah pengawasan aliansi Yordania-Arab. Usaha klaim Israel sudah mulai dilakukan sejak tahun 1950, saat parlemen Israel secara sepihak mendeklarasikan Kota Yerusalem sebagai ibukota

negara. Selanjutnya, dalam perang enam hari pada tahun 1967, Israel berhasil merebut kawasan Yerusalem timur dan mendeklarasikan kawasan tersebut sebagai miliknya. Meskipun, aneksi tersebut ditolak oleh masyarakat internasional, hingga tahun 2018 tidak ada negara yang membuka kedutaan besar di Yerusalem, hanya pembukaan kantor konsulat seperti Yunani, Inggris (Alexander, 2017).

Sebelum terbentuknya keputusan ini, pendahulu Trump telah memiliki kedekatan khusus dengan Yahudi seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Beberapa jenis bantuan yang di inisiasi oleh Trump pribadi untuk membantu terbentuknya Israel di Tanah Arab sebanyak 400 kali, sebagai berikut, Yayasan Donald J. Trump memberikan \$ 10,9 juta dari tahun 2001 hingga 2014, mengambil pendekatan scattershot ke filantropi dengan sumbangan kepada lebih dari 400 badan amal yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh analisis Forbes terhadap 14 tahun di dokumen IRS (*Internal Revenue Service*). *American Civil Liberties Union* mengungkapkan bahwa pemberian non-profit ini terus diberikan, sebanyak \$2,8 juta dari Trump langsung. Trump juga menjadi pendonor bagi *New York City Charity* yang bekerjasama dengan polisi untuk bidang pendidikan dan aktivitas anak-anak bersama dengan Ron Perelman, John Catsimatidis *New York* sejak tahun 2001-2014, mengeluarkan bantuan dana sebesar \$832.500, 8% dari total pemberian selama 14 tahun. Estimasi pemberian 36% dari 100 organisasi yang mempromosikan kesehatan dari the *Forbes* mengatakan bahwa *Trump Foundation* memberikan lebih dari \$465.000 ke *Dana-Farber Cancer Institute* dan *Smile Operation*. Organisasi ini memberikan kurang lebih \$326.000 ke *New York Presbyterian Hospital* dan \$250.750 ke institusi sejenis *Hospital for Special Surgery* yang berada di New York (Alexander, 2017).

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mempercayai bahwa ia berusaha untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina adalah dengan membuat dua negara.

Keseriusan Trump dalam mengusahakan perdamaian kedua negara adalah prioritas utamanya dalam semester pertama kepemimpinannya.

Trump sendiri memiliki kedekatan khusus dengan Israel. Kedekatan tersebut ditunjukkan dengan perubahan Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Tentunya keputusan Trump yang merubah kebijakan Amerika Serikat ini kemudian menimbulkan banyak pro-kontra. Benjamin Netanyahu memuji keputusan Trump tersebut, dan mengatakan bahwa keputusan Trump ini adalah langkah menuju perdamaian. Namun, tidak dengan Saeb Erekat sebagai negosiator perdamaian yang mengatakan bahwa ini adalah langkah yang mendikte dan menutup pintu negosiasi dan masih banyak lagi yang akan di lampirkan (Unknown, 2018).

Pada 10 September 2018, administrasi Trump mengumumkan keputusan untuk menutup kantor Delegasi Umum Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang ada di Washington DC. Kantor tersebut adalah bukti usaha perdamaian yang dihasilkan dari Kesepakatan Oslo tahun 1993-1995 yang menguraikan rencana untuk pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert menjelaskan bahwa keputusan penutupan PLO itu adalah usaha perdamaian yang lebih komprehensif. Sebaliknya pemimpin PLO mengecam rencana perdamaian Amerika, serta menolak untuk terlibat dengan pemerintah Amerika sehubungan dengan upaya perdamaian dan sebaliknya.

Saeb Erekat yang juga bekerja sebagai diplomat Palestina kemudian mengatakan bahwa ini tindakan penutupan PLO adalah bentuk penegasan dari kebijakan Administrasi Trump untuk secara kolektif menghukum rakyat Palestina. Peningkatan agresi kebijakan Amerika Serikat ini menjadi berbahaya bagi Palestina. Kebijakan administrasi ini kemudian dianggap dapat membubarkan sistem internasional untuk melindungi kejahatan dan serangan Israel terhadap tanah dan rakyat Palestina serta perdamaian di sekitarnya. Aaron David Miller dari Wilson Center

mengatakan bahwa keputusan untuk menutup kantor PLO, bersama dengan keputusan administrasi Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem dari Tel Aviv akan merubah tatanan tradisional kedua negara yang solutif (Unknown, 2018).

Kecenderungan Trump untuk mendukung Israel ini ditunjukkan pula dari beberapa pernyataannya mengenai Israel, salah satunya adalah “ *Israel one of my favorite places in the world*”, berarti “Israel adalah salah satu tempat favorit saya di dunia” seperti yang dia katakan pada tahun 2006 di konferensi bisnis internasional. Dukungan yang jelas juga diungkapkan oleh salah satu anaknya, Eric Trump yang mengatakan bahwa “*you can’t build the tallest building in Tel Aviv and try to negotiate about peace in Middle East*”¹⁰⁹ yang menunjukkan bagaimana kebijakan ini dianggap sebagai langkah paling tepat sebagai jalan perdamaian dengan mendukung Israel dan merubah ibukotanya menjadi Yerusalem (Drucker, 2017).

Kedekatan Donald Trump dengan Israel juga ditunjukkan dengan ucapan selamat dari Benjamin Netanyahu setelah kemenangan Trump yang menyatakan bahwa “*President-elect Trump is a true friend of the state of Israel,*” yang berarti bahwa Trump adalah sahabat Israel (Cordesman, 2017). Berbagai kesempatan pula Trump dan Netanyahu berulang kali melakukan pernyataan bahwa mereka adalah sahabat yang sangat dekat, sebagai tanda hubungan Amerika dan Israel. Lalu ditambahkan oleh Naftali Bennett “*Trump’s victory is an opportunity for Israel to immediately retract the notion of a Palestinian state in the centre of the country, which would hurt our security and just cause,*” dan “*This is the position of the president-elect ... The era of a Palestinian state is over.*” Yang berarti kemenangan Trump sebagai sebuah kesempatan untuk Israel memindahkan kedutaan Israel di Yerusalem dan menyatakan berakhirnya era Palestina (Beaumont, 2016).

Kedekatan politik Israel dan Amerika terbukti juga bahkan sebelum terpilihnya Trump. Salah satunya adalah usaha penutupan hutang pajak Amerika yang dibantu oleh Bank Leumi milik Israel menggunakan pada tahun 2014, dikatakan oleh Jared Kushner¹¹⁵. Sehingga mendukung kebijakan Donald Trump. Oleh karena itu dengan latar belakang Donald Trump yang cenderung berkecimpung di bidang bisnis dan memiliki kepentingan dengan Israel. Penelitian tentang perubahan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah suatu hal yang sangat menarik. Pembentukan keputusan Trump ini menjadi hal yang sangat vital karena berpengaruh pada dinamika dunia internasional dan melibatkan banyak golongan. Alur kebijakan administrasi kepemimpinan Donald Trump untuk mendukung Israel (Beaumont, 2016).

Perbedaan kepemimpinan Trump dengan presiden-presiden sebelumnya adalah konsiderasi reflek internasional terhadap kebijakan yang ia buat. Seperti perkiraan reflek negara-negara islam yang menjadi rekan kerjasama Amerika. Namun, karena kecenderungan Trump yang agresif dan tidak memikirkan jangka panjang, serta kepentingannya yang terbentuk dari faktor psikoanalisa. Pada akhirnya, Trump memutuskan kebijakan ini. Terlebih, Trump berpikir bahwa saatnya Amerika sebagai negara adidaya mulai membuat kebijakan yang progresif, bukan hanya untuk menguntungkan negara lain namun Amerika saja.

Menggunakan kekuatan dan kepercayaan politik yang digagas oleh pendukungnya. Trump kemudian dipandang sebagai alat belaka dari kekuatan Tuhan. Ini adalah pandangan Amerika-sentris tentang dunia, yang melihat Amerika Serikat sebagai "Israel baru" yang melaluinya Allah secara langsung campur tangan dalam urusan manusia. Ekstremisme agama dan lamanya tindakan presiden sebelum Trump adalah pendorong utama keputusan Trump ini. Selain itu alasan keamanan adalah hal yang menjadi pertimbangan bagi Trump, pada tahun 2017 konsekuensi potensial dari mengakui Yerusalem sebagai ibu kota tetap sama: resiko memicu protes di dunia

Arab dan membahayakan kedudukan Amerika Serikat sebagai pialang dalam pembicaraan damai mendatang. Namun, satu hal yang berbeda tentang iklim politik 2017 adalah bahwa ada "jendela peluang yang tidak ada sebelumnya," sebagaimana duta besar Israel untuk Amerika Serikat, Ron Dermer menjelaskan bahwa kedua belah pihak berbagi kekhawatiran keamanan tentang Iran. Apakah pandangan itu benar, masih harus dilihat, tetapi pembicaraan damai direncanakan untuk awal 2018 (Waxman, 2017).

Trump dikenal sebagai Presiden ambisius dan agresif, dilihat dari masa mudanya yang telah disebutkan di bab sebelumnya. Menurut Barbada Res yang mengabdikan kepada wakil Presiden di tahun 1980-an yang berinteraksi dengan Trump mengenai pembangunan konstruksi Manhattan, emosi yang ditunjukkan Trump terutama rasa marah adalah hal yang natural dan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Trump terkenal sebagai seorang negosiator yang handal dan sangat sulit dibantah. Kemarahan bisa menjadi pemantik yang baik dalam dinamika sosial, namun juga bisa menjadi pemantik dominasi negatif. Dalam kepemimpinannya, Trump juga menjadi pemimpin yang sangat sulit ditebak karena kepribadiannya yang ekstrovert dan suka mengambil resiko tinggi. Seperti menutup kantor PLO di Amerika, PLO adalah organisasi pembebasan Palestina yang dibentuk pada 28 Mei 1959 dan didukung oleh 100 negara peninjau.

Dengan dinamika internal Gedung Putih yang sedemikian bergejolak, Trump kemudian dinyatakan sebagai presiden dengan perombakan paling sering di sejarah Amerika. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan, pada analisa psikologi yang dikeluarkan oleh *The Atlanta* berjudul "The Mind of Donald Trump" yang membahas tentang psikologi pemimpin-pemimpin sebelum dan dibandingkan dengan Trump. Hasilnya, kepribadian Trump adalah tipe kepemimpinan yang sangat mudah terbakar, menjadi satu-satunya presiden yang tidak ramah dengan fakta, suka membuat keputusan berani yang agresif, mudah putus asa namun ingin menciptakan hasil paling

baik, tinggi, bersinar serta mengagumkan, yang paling buruk adalah sukar untuk berpikir dua kali terhadap efek keputusan yang ia ambil, dan tidak memberikan jaminan atas kerusakan yang diperbuat (McAdams, 2016).

Kedekatan Trump dengan Yahudi juga ditunjukkan dalam kabinet dan penasehatnya yang berisi orang di Yahudi. Beberapa diantaranya adalah orang-orang yang mendukung “*white supremacist*”, David Duke. Beberapa orang kabinet yang berasal dari kaum Yahudi diantaranya adalah (Dolsten, 2018):

1. Jason Greenblatt

Greenblatt sebelumnya bekerja sebagai pengacara *real-estate* untuk Trump selama 19 tahun. Selain itu, Greenblatt adalah satu dari dua pengacara yang menurut Trump cocok untuk menjadi penasehat Israel. Sebagai seorang lulusan Yahudi Ortodoks dan Universitas Yeshiva dan berkuliah pada pertengahan tahun 1980 an. Greenblatt adalah ayah dari enam anak dari Teaneck New Jersey dan tidak memiliki pengalaman politik. Namun karena kedekatannya dengan kaum Yahudi, ia menjadi ahli pembuat pidato Trump yang berhubungan dengan Yahudi. Dalam urusan perdamaian antara Israel dan Palestina, Greenblatt menyatakan bahwa solusi yang disediakan Trump yang paling mungkin dilaksanakan adalah, solusi dua negara. Selain itu, ia mengatakan bahwa adanya pemukiman Yahudi bukanlah masalah penghambat terciptanya perdamaian.

2. David Friedman

Bersamaan dengan Greenblatt, Trump juga dekat dengan David Friedman yang berumur 57 tahun. Bertugas sebagai penasihat Israel. Friedman adalah ahli bisnis dan mitra dari firma hukum Kasowitz di New York dan bertugas sebagai pengacara lama dari Trump. Putra seorang rabi¹²⁶ konservatif dengan sejarah keluarga yang terikat dengan kandidat presiden dari partai

Republik sejak tahun 1984. Pada tahun itu, Friedman menjamu Ronald Reagan untuk makan siang Shabbat¹²⁷ dan berhasil memenangkan Reagan dalam pemilihan ulang. Friedman tinggal di Woodmore, New York, dan memiliki rumah di lingkungan Talbith di Yerusalem. Friedman telah menyatakan keraguannya tentang masa depan solusi dua negara yang secara tradisional menjadi pilar kebijakan bipartisan Amerika di wilayah tersebut. Friedman bahkan sudah mulai tidak mempercayai solusi dua negara, dalam artian Friedman beranggapan bahwa Israel dapat menjadi negara satu-satunya.

3. Jared Kushner

Kushner adalah menantu Donald Trump yang menikah dengan anaknya bernama Ivanka Trump. Kushner memerankan bagian penting dalam kampanye Donald Trump. Sebagai seorang Yahudi ortodoks ia memiliki pengetahuan yang cukup dalam berkaitan dengan Israel. Kushner mengerjakan pidato Trump di konferensi kebijakan tahunan di AIPAC yang membuat Trump mendapat tepuk tangan yang meriah. Kushner adalah anak dari pemilik usaha terkenal di Manhattan. Ia telah terbiasa dengan perhatian publik sejak berusia 25 tahun, ia telah menunjukkan keahliannya dalam melihat peluang bisnis dengan membeli koran Observer. Dua tahun kemudian ia menjadi CEO perusahaan ayahnya, *Kushner Properties*, empat tahun kemudian ayahnya masuk penjara karena penggelapan pajak, sumbangan kampanye ilegal, dan perusakan sanksi. Pada tahun 2015, Kushner dinobatkan dalam *40 Under 40* oleh Forbes, sebagai pebisnis muda dibawah 40 tahun yang berpengaruh.

4. Ivanka Trump

Ivanka adalah anak Trump yang berusia 35 tahun yang berpindah kepercayaan menjadi Yahudi Ortodoks seperti suaminya. Ivanka juga memiliki andil yang cukup besar dalam membersihkan profil Donald Trump yang saat itu tersandung skandal pelecehan seksual.

Ivanka sendiri merupakan pengusaha yang sukses dan menjadi penggerak sosial dalam pemberdayaan perempuan yang bekerja. Ivanka adalah pendiri *Ivanka Trump Collection* sebuah merek *fashion* dan gaya hidup yang memiliki konsumen para eksekutif dan wakil presiden yang dikembangkan oleh *Trump Organization*. Ivanka juga masuk dalam *40 Under 40* oleh Forbes pada tahun 2014, satu tahun sebelum suaminya.

5. Boris Epshteyn

Epshteyn berusia 34 tahun adalah seorang ahli strategi partai Republik yang juga menjadi pembela Trump yang kuat dan tampil di jaringan TV sebanyak 100 kali menurut perhitungan *The New York Times*. Latar belakang Epshteyn sebagai mantan warga negara Rusia yang merupakan penduduk asli Moskow yang berpindah ke Amerika Serikat pada tahun 1993. Ia merupakan pembicara Rusia yang fasih dan telah memoderasi sebuah panel investasi di Moskow. Ia menjadi aset yang berharga bagi Trump karena menavigasi dan memperkuat hubungan Rusia dan Trump, terutama setelah Trump menyatakan keinginannya untuk meningkatkan hubungan dengan Presiden Vladimir Putin.

Ia juga bekerja sebagai seorang bankir investasi dan pengacara keuangan yang bermarkas di New York. Sebelumnya ia merupakan pembantu komunikasi kampanye kepresidenan Senator John McCain pada tahun 2008 yang fokus dalam upaya pada pasangan calon senator Arizona yang saat itu adalah calon senator Arizona yang juga menjabat sebagai Gubernur Alaska, Sarah Palin. Menurut laporan, Trump sedang mempertimbangkan Epshteyn sebagai sekretaris dalam negeri menurut sumber dari Politico. Namun Epshteyn tidak memiliki reputasi yang baik di antara media Amerika karena terkenal sangat agresif dan abrasif. Pada tahun 2014, Epshteyn didakwa melakukan pelanggaran ringan setelah ia terlibat dalam pertengkaran di bar. Namun, tuduhan itu dibatalkan setelah Epshteyn menjalani pelatihan

manajemen kemarahan dan pelayanan masyarakat.

6. Steven Mnuchin

Mnuchin adalah seorang eksekutif Goldman Sachs, ia bekerja sebagai Ketu Keuangan Nasional Trump selama kampanye dengan tujuan mengumpulkan lebih dari US\$ 1 miliar untuk Trump. Kerjasama antara mereka berdua telah terjalin mulai dari hubungan pertemanan mereka selama 15 tahun dan sebelum bertanggung jawab atas keuangan kampanye Trump. Mnuchin bertugas sebagai penasihat. The New York Times menggambarkan hubungan mereka sebagai “satu keluarga yang berpengaruh di Manhattan”, Mnuchin dan ayahnya menjadi kaya setelah bekerja di Goldman Sachs. Mnuchin yang lebih muda berkulat di dunia hiburan bernama *RatPac-Dune Entertainment* yang mengerjakan beberapa film *box office* seperti “*Avatar*” dan “*Black Swan*”. Beberapa orang melihat kerjasama diantara keduanya sebagai sebuah hal yang unik, mengingat Trump berusaha menghancurkan Goldman Sachs. Namun, tampaknya hal tersebut tidak menghalangi hubungan keduanya, bahkan Trump berpikir untuk menjadikan Mnuchin sebagai menteri keuangan kepada Politico Lewis Eisenberg

Eisenber kepala ekuitas swasta untuk *Granite Capital International Group* menjabat sebagai ketua keuangan untuk Komite Nasional Republik. Ia juga pengurus dari kelompok *Republican Judaism Coalition* (RJC) atau Koalisi Republik Yahudi yang memberikan kontribusi penting terhadap pencalonan Trump. Ia menjadi kontributor utama bagi kelompok-kelompok yang mendukung pemilihan Trump dan bersama Mnuchin menjadi tim suksesor pengumpulan dana. Eisenberg dibesarkan di New Jersey dan mencalonkan diri sebagai sekretaris perdagangan dalam pemerintahan Trump. Eisenberg sangat bersemangat dalam kepemimpinan Trump. Kedekatan antar keduanya dibuktikan dengan pernyataan Trump bahwa Eisenberg akan menjadi advokat yang kuat untuk Israel demi keadilan dan ketertiban.

7. Michael Glassner

Glassner bukanlah orang baru dalam kampanye presiden Republik ketika Trump menunjuknya tahun lalu untuk menjabat sebagai direktur politik nasionalnya. Ia bekerja sebagai direktur operasi wakil presiden untuk kampanye McCain 2008 dan menjalankan kampanye George W. Bush di Iowa pada tahun 2000. Glassner juga bekerja dengan Palin dan Senator Bob Dole, seorang mantan kandidat presiden. Seperti penasihat Yahudi Trump lainnya, Glassner terang-terangan mendukung Israel. Sebelum ia bergabung dengan kampanye Trump, ia bekerja sebagai direktur politik untuk *Southwest Regional AIPAC*. Glassner menyatakan fakta bahwa ia mendukung Trump karena kedekatannya dengan Palin yang memiliki persamaan nilai dengan nilai pesan politik luar negeri Trump.

Tentunya kedekatan Trump dengan para pengurus kelompok penting Yahudi ini mempengaruhi pola pikir Donald Trump. Terutama kecenderungan setiap individu yang mendukung Israel. Hal tersebut tentunya mengundang banyak reaksi. Salah satunya adalah reaksi dunia internasional mengenai Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang pada akhir 2017 memutuskan untuk memproklamkan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Tindakan ini tentunya banyak menuai kontroversi, karena dianggap merusak citra Amerika sebagai penjaga perdamaian antara kedua negara yang berkonflik. Ancaman demi ancaman yang dilayangkan oleh negara yang kontra dengan keputusan tersebut, namun nyatanya tidak membuat Trump gentar.

Pembahasan terkait dengan kebijakan luar negeri tidak terlepas dari peran perumus kebijakan itu sendiri. Setidaknya ada dua aspek yang dapat dianalisis dari perumus kebijakan di AS yaitu legislatif dan eksekutif. Amerika Serikat adalah salah satu contoh negara yang menganut sistem bikameral. Lembaga legislatif AS terdiri dari Kongres dan Senat (Sayre, 1966).

Kongres merupakan anggota legislatif yang dipilih dari Partai Republik dan Demokrat, sedangkan Senat adalah anggota legislatif yang dipilih sebagai representasi negara bagian. Kedua lembaga legislatif tersebut adalah aktor penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Senat memiliki kuasa untuk wewenang untuk menunjuk staf diplomatik, konsuler dan personil Departemen Luar Negeri AS. Kekuatan terbesar Senat adalah dapat menolak perjanjian, negosiasi ataupun rancangan kebijakan luar negeri yang diajukan oleh presiden. Sebuah perjanjian internasional yang diajukan oleh presiden, harus mendapatkan persetujuan dari Senat setidaknya 2/3 suara dari jumlah Senat yang menghadiri sidang di parlemen (Sayre, 1966).

Lobi-lobi politik biasanya terjadi pada proses negosiasi antara presiden dan Senat. Seorang presiden di AS setidaknya membutuhkan konsultasi dan dengar pendapat terkait ratifikasi perjanjian ataupun bantuan internasional yang diajukan olehnya. Posisi Senat dalam hal pengambilan kebijakan luar negeri sebagai representasi rakyat di negara bagian AS. Senat berhak menunda, menyetujui atau bahkan berseberangan dengan presiden jika bantuan ataupun persetujuan internasional yang diajukan presiden tidak memberikan manfaat pada masyarakat di negara bagian AS. Kesuksesan seorang presiden AS dalam merumuskan kebijakan luar negerinya terletak pada kemampuannya dalam menempatkan beberapa anggota Senat dalam proses negosiasi (Sayre, 1966).

Sebuah perumusan kebijakan luar negeri dianggap gagal jika presiden AS tidak mampu melobi Senat dalam meratifikasi sebuah kerjasama, perjanjian ataupun dukungan internasional. Ketika sebuah usulan kebijakan luar negeri AS disetujui oleh Senat, presiden dapat mengeksekusi kebijakan tersebut ataupun membuka kembali negosiasi dengan Senat ketika ada pasal dalam draft kebijakan yang harus direvisi. Pada proses negosiasi tersebut, kelompok lobi memiliki peran sebagai sumber informasi penyusunan kebijakan itu dan melobi Senat maupun presiden agar

kebijakan luar negeri pemerintah AS menguntungkan kepentingan kelompok lobi tersebut. Salah satu perumus kebijakan lainnya dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS di legislatif adalah Kongres yang merupakan representasi partai politik seperti Republik dan Demokrat (Sayre, 1966).

Pada proses pengambilan kebijakan luar negeri, Kongres mempunyai wewenang untuk mengawasi, mengontrol dan mengajukan hak interpelasi ketika visi dan misi yang dijalankan eksekutif dalam menjalankan kebijakan luar negeri bertentangan dengan kepentingan nasional dan konstitusi AS. Kontrol penuh Kongres terhadap kebijakan luar negeri AS memang tidak secara langsung. Kongres tidak memiliki hak eksekutif seperti yang dimiliki oleh Senat. Akan tetapi, Kongres mempunyai peran yang sangat penting. Salah satunya adalah kontrol terhadap aspek finansial yang digunakan presiden dalam menjalankan kebijakan luar negerinya (Sayre, 1965: 96).

Orang pertama yang berhak menentukan arah kebijakan politik luar negeri AS adalah presiden sebagai eksekutif. Sebagai commander in chief, presiden merupakan orang pertama yang menjadi tulang punggung perumusan kebijakan luar negeri. Presiden berhak menentukan siapa yang pantas menjabat staf diplomatik, mengadakan kunjungan luar negeri dan menentukan hubungan bilateral dengan Negara lain. Tentunya presiden mempunyai hak prerogatif. Hak yang dimiliki presiden salah satunya adalah mendeklarasikan perang selama hak prerogatif tersebut dapat meyakinkan Kongres dan Senat (Sayre, 1966).

Kelompok lobi Israel memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah. Mengacu pada hasil wawancara dengan Syukur, peneliti dari ISMES, diperoleh data bahwa kelompok lobi Israel memiliki peran penting sebagai kelompok penekan yang berusaha untuk menyeleraskan kebijakan luar negeri AS dengan kepentingan Israel. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah 60 persen dari hak veto AS digunakan untuk melindungi kepentingan negara Zionis tersebut. AIPAC merupakan salah satu dari kelompok kepentingan yang memiliki

kapabilitas dalam melobi para pembuat kebijakan luar negeri di AS. Data yang diinformasikan oleh informan tersebut sesuai dengan data sekunder yang diperoleh oleh peneliti. Fortune Magazine dan A National Journal (Mearsheimer, 2008) mempublikasikan hasil risetnya pada Maret tahun 2005 yang menyatakan bahwa kelompok lobi Israel seperti AIPAC adalah kelompok lobi terkuat kedua di Amerika Serikat.

Banyak faktor pendorong yang menjadikan beberapa kelompok lobi Israel seperti, AIPAC, ADL dan ZOA sebagai kekuatan lobi terkuat. Bila mengacu pada teori Rourke tentang kelompok lobi, lobi tersebut adalah bagian dari cultural interest group. Kelompok tipe tersebut sangat kuat ikatan emosionalnya karena dipengaruhi oleh sentimen agama, ras dan budaya. Umumnya mereka bersatu padu bila menjadi kaum minoritas. Kelompok lobi Israel itu sendiri adalah minoritas di Amerika Serikat, walaupun mereka memiliki kekuatan mayoritas.

Data lain yang diperoleh dari ISMES adalah kelompok lobi Israel menggunakan pula opini publik sebagai alat lobi mereka. Opini publik yang selalu mereka gunakan adalah tentang anti-semitisme. Propaganda tentang anti-semitisme ini cukup berperan penting terhadap karir politik perumus kebijakan di AS. Mereka yang berseberangan secara politik dengan Israel akan dicap anti-semit dan ini akan berdampak pada karir politik mereka. Opini publik tersebut digunakan kelompok lobi Israel untuk melobi elite politik AS melalui media massa yang memang secara mayoritas dikuasai oleh simpatisan lainnya. Hal ini relevan dengan teori kebijakan luar negeri Lovell bahwa yang menjadi input kebijakan luar negeri adalah opini, kepentingan, kebutuhan dan permintaan. Oleh karena itu, opini adalah salah satu media yang digunakan kelompok lobi Yahudi untuk mencapai kepentingan politiknya. Keberhasilan dan efektivitas lobi Yahudi itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan AS itu sendiri yang demokrasi, plural dan terbuka (Mearsheimer, 2008).

Negara yang menganut sistem demokrasi seperti AS sangat memudahkan berkembangnya aktivitas lobi itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari jaminan kebebasan berpolitik dan kebebasan berpendapat. Seperti yang diutarakan oleh Hudson pada bab sebelumnya, sistem terbuka memungkinkan kelompok lobi memiliki akses informasi. Keberadaan informasi sendiri adalah esensi penting bagi para pengambil kebijakan. Di dalam sebuah informasi terdapat needs, opinion, interest dan demands yang menjadi input bagi pembuatan kebijakan luar negeri. Hal lainnya yang menjadi input kebijakan luar negeri dalam penelitian ini adalah kepentingan. Sangatlah jelas bahwa kelompok lobi Israel memiliki kepentingan terhadap AS untuk mencapai maksud politiknya. Poin penting lainnya yang diambil dalam penelitian ini adalah kepentingan (*interest*). Kelompok lobi Israel memiliki kepentingan di Timur Tengah khususnya Palestina untuk menjaga eksistensi Israel dengan cara menginginkan adanya one state solution. Salah satu cara untuk mencapai kepentingannya adalah menggunakan power AS. Secara hard power, AS memiliki kekuatan secara politik khususnya pengaruh di Dewan Keamanan PBB. Mekanisme lobi di dalam politik domestik AS didasarkan pada kapabilitas kelompok lobi Israel untuk menyuap dan menahan karir politik oposisi yang dianggap kritis oleh Israel (Mearsheimer, 2008).

Oleh karena itu, para perumus kebijakan di legislatif dan eksekutif AS memiliki kepentingan juga dengan kelompok lobi Israel. Elite politik AS membutuhkan eksistensi mereka untuk mendukung karir politik mereka baik secara finansial atau suara pada saat pemilu. Hal lainnya yang memengaruhi efektivitas lobi Israel ini adalah kemampuan mereka untuk menempatkan kandidat-kandidat elite politik yang berpotensi menjadi mitra strategis mereka selama pemilihan umum.

Kekuatan struktur informal di dalam pemerintahan AS memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pada penelitian ini, lobi Israel sebagai bagian dari

kekuatan informal mempunyai peran penting sebagai salah satu bagian dari pembuatan kebijakan luar negeri. Posisi mereka yang kuat baik secara finansial, akses politik dan melimpahnya sumber daya informasi sangat memudahkan untuk menjaga eksistensi Israel melalui pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat. Di satu sisi, tidak bisa dipungkiri juga bahwa kelompok lobi Israel memiliki kedekatan dengan elite politik partai di AS seperti elite politik neokonservatif yang ada di Partai Republik. Aktivitas politik neokonservatif di Partai Republik AS pada umumnya identik dengan hegemoni, militerisme dan mereka percaya bahwa AS perlu untuk menyingkirkan lawan-lawan politik pada konstelasi global (Mearsheimer, 2008).

Secara garis besar kepentingan nasional pemerintah AS beririsan dengan Israel. Negara tersebut memiliki hubungan bilateral yang buruk dengan Iran, Irak dan Palestina serta aktor transnasional seperti Al-Qaeda dan Hisbullah. Kesamaan tersebut acapkali digunakan oleh kelompok lobi Israel untuk menjadi alasan mengapa Israel perlu mendapatkan prioritas dalam kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah. Bila dianalisis melalui pendekatan teori pluralis, kelompok lobi Israel tersebut menggunakan isu-isu yang selalu menjadi topik khusus di Partai Republik. Secara akses politik, kelompok lobi Yahudi tersebut mempunyai simpatisan-simpatisan Israel yang berada di eksekutif dan legislatif (Mearsheimer, 2008, p. 311).

Mereka melobi para pembuat kebijakan di dalam pemerintahan AS dengan memosisikan Israel sebagai mitra strategis AS dan kedua negara tersebut memang memiliki musuh bersama. Legitimasi yang digunakan oleh kelompok lobi tersebut memudahkan kepentingan mereka untuk diakomodir oleh elite-elite politik neokonservatif. Elite politik tersebut pun memandang Israel bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sekutu dan “penjaga” kepentingan AS di Timur Tengah. Isu-isu spesifik tersebut cukup berhasil. Sebagai contoh, pemerintah AS sendiri

mendukung penuh invasi Israel tersebut dan menghindarkannya dari sanksi Resolusi DK PBB 1701 ketika terjadi konflik bersenjata antara Israel dan Hisbullah di Lebanon Selatan.